



KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAKARTA TIMUR

Tritanti, Budi Puspo Priyadi, Hartuti Purnaweni

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kota
Pos. 1269

Telepon ((024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by employment problems, namely the high level of young people who are working or not working who lack competence, the occurrence of skill gap, low productivity which results in losing competitiveness with foreign workers. The government's efforts to overcome these employment problems are by issuing a Pre-Employment Card program policy. The program was carried out when the Covid-19 pandemic caused the program to have other objectives, namely associal safety net. This caused the budget for the program to double. During its implementation, the Pre-Employment Card program drew a lot of criticism from the public, politicians and observers and even the program participants themselves who stated that the program was not on target and was not effective in helping the community during a pandemic, especially in increasing competency. Several program participants who live in East Jakarta City expressed the same thing. The purpose of this research is to find out the performance of the implementation of the Pre-Employment Card program in the midst of the Covid-19 pandemic in the City of East Jakarta which has not been maximized; as well as knowing the obstacles to the non-maximum implementation of the Pre-Employment Card program in East Jakarta City seen from the background of the social and economic conditions of the program participants. This study uses a descriptive qualitative method with an approach purposive sampling and Netnography as the data collection method. The results of the study showed that the standards and objectives of the Pre-Employment Card program were in accordance with the recipients of the Pre-Employment Card program which were right on target but found defects in the process of using the program by participants who were also influenced by the program, but indeed the program objectives had not been achieved properly, apart from that financial resources had been fulfilled but there are indications of inaccuracy target. Factors from the social, economic and occupational background of the participants during the pandemic also contributed to the program's ineffectiveness towards the participants. Obstacles found related to increasing participant competence were influenced by the high price of training, the quality of the training material content, and the need for internet quota. The recommendations given are that the government is reviewing the program regarding dual roles, immediately implementing job training on a regular basis offline coordinating with DKI Jakarta Manpower Office, East Jakarta City Sudinasker and BLK in East Jakarta City as well as evaluating partnerships with training providers.

Keywords: Pre-Employment Card Program, Ineffectiveness, Competency Improvement, Covid-19, Job Training, Employmen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai aset bangsa, penduduk Angkatan Kerja Indonesia tentu harus memiliki kualitas diri yang mumpuni. Minimnya pendidikan, kompetensi atau *skill* yang dimiliki penduduk angkatan kerja Indonesia menjadi salah satu perhatian serius yang harus segera ditindak lanjuti. Peralunya, rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh penduduk angkatan kerja berpengaruh terhadap rendahnya kualitas SDM Indonesia dan berimplikasi pada rendahnya daya saing pekerja Indonesia terhadap pekerja dari negara lain (Kemenko Perekonomian, 2020). Akhirnya, SDM Indonesia akan kalah dengan SDM luar sehingga meningkatnya angka pengangguran pun menjadi tak terhindarkan.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada bulan Februari 2020 dan Agustus 2020 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan, Indonesia mengalami kenaikan persentase dari 4,94% pada bulan Februari, meningkat menjadi 7,07% pada bulan Agustus. Hal ini tidak dipungkiri karena efek dari terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda. Tingkat pengangguran terbuka sendiri definisinya adalah persentase jumlah pengangguran

terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-64 tahun).

Data dari BPS, 2019 (Kemenko Perekonomian, 2020) mengatakan kurang lebih 90% angkatan kerja Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Tabel 1. 1
Penduduk Yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka Yang Pernah atau Sedang Mengikuti Pelatihan Kerja Tahun 2020

No.		Sedang Mengikuti Pelatihan Kerja	Pernah Ikut Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat	Belum Pernah Mengikuti Pelatihan	Total
1	Penduduk Yang Bekerja	0,85 Juta Orang (0,65%)	13,51 Juta Orang (10,31%)	116,66 Juta Orang (89,04%)	131,02 Juta Orang
2	Pengangguran Terbuka	0,09 Juta Orang	0,64 Juta Orang	6,15 Juta Orang	6,88 Juta Orang

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2020.

Dari data tersebut, Pengangguran Terbuka (PT) per tahun 2020 didominasi oleh penduduk yang belum pernah mengikuti pelatihan sebanyak 6,15 Juta Orang dari total keseluruhan mencapai 6,88 Juta penduduk. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingkat produktivitas angkatan kerja Indonesia masih sangat rendah.

Upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah adanya peningkatan kompetensi. Menurut (Pusdatinaker, 2019) terdapat 3 jalur utama peningkatan kompetensi tenaga kerja, yaitu melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan karir di tempat kerja. Upaya peningkatan

kompetensi kerja, yakni mengukur kemampuan individu dalam melakukan pekerjaan apakah bisa melakukan suatu pekerjaan, dan dapat diakui oleh perusahaan/*recruiter* serta berada pada level atau tingkatan kompetensi tertentu. Kemampuan kompetensi ini dapat dibuktikan oleh sertifikasi pelatihan. Dengan durasi yang pendek dan sangat adaptif terhadap dinamika perubahan kebutuhan kompetensi di pasar kerja, pelatihan kerja menjadi jalur peningkatan kompetensi yang paling diunggulkan dan semakin digalakkan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan program Kartu Prakerja untuk memfasilitasi pekerja Indonesia dalam peningkatan kompetensi berbasis bantuan pelatihan kerja dengan harapan dapat menciptakan SDM yang berkualitas. Selain itu, karena adanya pandemi program Kartu Prakerja mengemban tugas baru, yakni sebagai program semi-bantuan sosial demi membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional masa pandemi.

Dalam implementasinya, program Kartu Prakerja mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat, tokoh politik, serta hasil penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang mengatakan bahwa program tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Hal ini

lah yang menjadi dasar dugaan peneliti untuk melakukan penelitian kinerja implementasi kebijakan program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja diimplementasikan dengan sistem *full online* sehingga penduduk usia kerja dari berbagai daerah di Indonesia dapat mengikuti pelatihan. Berdasarkan data yang diperoleh, penerima program terbanyak berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Penelitian ini memfokuskan masalah ketenagakerjaan yang saat ini tengah dialami sehingga pemilihan lokus juga mengedepankan kondisi ketenagakerjaan di daerah lokus tersebut.

Peneliti mendalami fenomena ketidakmaksimalan kinerja implementasi program Kartu Prakerja di Provinsi DKI Jakarta sebagai pertimbangan kota besar. Penelitian difokuskan di Kota Jakarta Timur. Pemilihan lokus ini berlandaskan data-data yang ditemukan, yakni Kota Jakarta Timur sebagai kota dengan peserta terbanyak pesertanya dibandingkan kota-kota Jakarta lainnya mencapai 29% dari total jumlah keseluruhan, yakni 82 ribu peserta pada *batch* 1-11. Selain itu data yang didapat dari PPKPI menyatakan bahwa kenaikan jumlah peserta pelatihan terjadi di setiap tahunnya. Seperti pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2
Peserta pelatihan kerja di PPKPI Provinsi
DKI Jakarta yang berdomisili di Kota
Jakarta Timur tahun 2018-2020

2018		2019		2020	
Periode	Jumlah Peserta	Periode	Jumlah Peserta	Periode	Jumlah Peserta
Angkatan I	218	Angkatan I	412	Angkatan I	398
Angkatan II	271	Angkatan II	417	-	-
Angkatan III	273	Angkatan III	329	-	-
Jumlah	762		1158		398

Sumber: PPKPI Provinsi DKI Jakarta

Data di atas mengindikasikan bahwa penduduk angkatan kerja di Kota Jakarta Timur memiliki antusiasme yang tinggi mengikuti pelatihan. Di tahun 2020 pada masa pandemi terjadi penurunan jumlah peserta yang signifikan karena pelatihan secara *offline* ditiadakan. Oleh sebab itu, situasi ini menempatkan program Kartu Prakerja menjadi substitusi program pelatihan yang dicari-cari oleh penduduk angkatan kerja di Kota Jakarta Timur. Selain itu, data tingkat Pengangguran Terbuka (PT) di Kota Jakarta Timur pada tahun 2018 menempati posisi tertinggi kedua dengan jumlah 6,67%, di tahun 2019 sebanyak 6,15%, dan di tahun 2020 sebanyak 9,29%. Kondisi-kondisi di bidang ketenagakerjaan pada masa pandemi di Kota Jakarta Timur ini tentu mempengaruhi keberhasilan implementasi program lebih baik dibandingkan provinsi atau daerah-daerah lainnya. Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta menjadi kota yang

menarik untuk dijadikan sebagai lokus penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kinerja Implementasi kebijakan program kartu Prakerja dilihat dari standar dan sasaran kebijakan belum efektif?
2. Apakah yang menjadi kendala ketidakmaksimalan implemetasi program Kartu Prakerja pada peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur yang belum efektif.
2. Menganalisis kendala ketidakmaksimalan implementasi program Kartu Prakerja pada peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur.

D. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Gerald Caiden (dalam Sellang, 2019), Administrasi Publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-

perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

2. Kebijakan Publik

Winarno dan Sholichin Abdul Wahab (dalam Agustino, 2004) sependapat mengenai istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya kerap diumpamakan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Implementasi Kebijakan Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

3. Program

Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan

upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Berdasarkan Teori Implementasi Program karya Van Meter Van Horn (dalam Subarsono, 2021) menyatakan faktor-faktor yang dapat memberi efek terhadap keberhasilan proses implementasi suatu program, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya kebijakan, komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi, karakteristik jawatan pelaksana, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya kebijakan, serta faktor lingkungan sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk memperdalam fenomena terkait kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di tengah pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur. Situs penelitian ini adalah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling* melalui wawancara, netnografi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Subjek penelitian ini adalah 5 orang peserta

program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur yang merasa bahwa program Kartu Prakerja tidak berhasil memberikan manfaat yang signifikan kepada mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pembahasan standar dan sasaran kebijakan dibagi menjadi standar kebijakan, tujuan kebijakan, dan sasaran kebijakan. Standar kebijakan program Kartu Prakerja diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Hal ini mengindikasikan Program Kartu Prakerja telah menetapkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tujuan kebijakan, yakni untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendorong tumbuhnya wirausaha dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyatakan pelatihan *online* tidak efektif disaat pandemi. Kurang minatnya peserta untuk mengikuti pelatihan dikarenakan pelatihannya hanya menonton secara *online* dan membuat peserta bosan dan secara tidak langsung

tidak meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh penerima manfaat program. Sedangkan sasaran program Kartu Prakerja dianalisis dari:

- i. Alasan mengikuti program. Hasil penelitian mengemukakan bahwa peserta, yakni 5 orang program Kartu Prakerja sudah tepat sasaran. Tujuan peserta selaras dengan tujuan program, yakni ingin meningkatkan kompetensi, mendapatkan sertifikat dan membutuhkan bantuan sosial pada pandemi. Oleh karena itu, kelima peserta dalam penelitian ini, yakni 5 orang peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur adalah sasaran yang tepat, yang dapat menunjang terwujudnya tujuan program Kartu Prakerja, yakni peningkatan kompetensi kerja.
- ii. Motif dan korelasi pemilihan pelatihan dengan latar belakang peserta. Motif pemilihan pelatihan di program Kartu Prakerja didasarkan karena kebutuhan jenjang karir serta korelasi antara pemilihan pelatihan dan pekerjaan peserta sebelum dan pekerjaan yang ingin didapatkan juga sudah sesuai. Kesesuaian ini mengindikasikan bahwa peserta memang mempunyai ekspektasi tersendiri terhadap pelatihan yang diikutinya dan berharap pelatihan tersebut dapat berpengaruh pada

kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Namun kenyataannya, peserta dikecewakan oleh isi materi pelatihan yang belum bisa meningkatkan kompetensi mereka sehingga berujung pada tidak adanya pengaruh yang signifikan untuk kebutuhan peserta saat itu.

- iii. Penggunaan insentif. Adanya *double* sasaran pada program, baik untuk yang ingin meningkatkan kompetensi maupun yang membutuhkan bantuan dana, menyebabkan sasaran pada program ini termasuk cukup luas.
- iv. Sikap dan perilaku kelompok sasaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketepatan sasaran ini. Kelima peserta secara kualifikasi memang sudah sesuai dengan sasaran program tetapi tidak tepat secara proses pemanfaatan pembelajaran pelatihan pada program Kartu Prakerja. Hal ini dapat dilihat dari peserta yang menyatakan ketika mengikuti pelatihan mereka tidak begitu memperhatikan materi, hanya memutar video materi pelatihan saja untuk mempercepat pelatihan selesai, bahkan ada satu peserta yang mengikuti pelatihan sambil tertidur. Sikap dan perilaku peserta ketika mengikuti pelatihan pada program Kartu Prakerja ini mengakibatkan program menjadi tidak efektif

membantu peserta dalam mengupayakan peningkatan kompetensi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sikap dan perilaku tersebut alih-alih karena dipengaruhi ketidaksesuaian isi materi pelatihan dengan ekspektasi peserta, yang mengharapkan materi pelatihan tidak hanya materi dasar saja melainkan materi yang mendetail dan komprehensif.

b. Sumberdaya Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengatakan ada dua sumber yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sumberdaya dana/finansial dan sumberdaya manusia. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk mendanai program yang telah direncanakan. Dengan demikian besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan program Kartu Prakerja.

Anggaran keuangan untuk program diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 /PMK.OS/2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. Total keseluruhan

selama implementasi program yang telah berjalan selama 2 tahun mencapai Rp53 triliun. Hasil penelitian menemukan bahwa ada indikasi pemborosan anggaran negara. Hal ini karena kurang lebih sebesar 33% dari total anggaran program diperuntukkan bagi kerjasama dengan pihak swasta, yakni lembaga penyedia pelatihan. Sementara, hasil wawancara bersama peserta penelitian ditemukan bahwa peserta merasa hasil pelatihan yang didapatkan dari lembaga penyedia pelatihan tidak berdampak secara signifikan bagi kebutuhan peserta dalam peningkatan kompetensi maupun karir kerja. Dengan ini memperkuat hasil dugaan bahwa implementasi kebijakan program Kartu Prakerja jauh dari kata efektif.

c. Faktor Sosial dan Ekonomi Peserta

Keragaman perilaku kelompok sasaran perlu dianalisis lebih lanjut apakah para peserta mendukung keberhasilan program atau menolak. Perilaku-perilaku ini sangat menentukan bagaimana implementasi program terhadap peserta. Sosial membahas mengenai usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan peserta, pengalaman, dampak pandemi, dan tekanan sosial sedangkan ekonomi membahas mengenai kondisi finansial peserta dan pekerjaannya ketika masa pandemi.

i. Kondisi Sosial

Hasilnya kondisi sosial peserta program dilihat dari usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan peserta, dampak pandemi, dan tekanan sosial mendukung tercapainya tujuan program. Namun, pengalaman yang dibagikan peserta dalam penelitian ini mengemukakan bahwa tidak merasakan manfaat dari hasil pelatihan selain insentif. Begitu juga materi pelatihan yang sudah umum dan tersedia banyak di internet.

Menurut peserta program, selama mengikuti serangkaian program, isi pelatihan tidak mendetail, materi hanya teori semata tidak ada pembelajaran seperti pemecahan kasus/masalah yang kemungkinan akan dihadapi nantinya di dunia kerja sehubungan dengan materi, dan pengetahuan yang didapat dari pelatihan kurang bisa diterapkan dalam kebutuhan peserta. Selain itu, peserta menemukan sejumlah lembaga penyedia pelatihan yang melakukan promosi pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada program Kartu Prakerja sarat dengan oknum-oknum yang bisa menghambat tercapainya tujuan program.

ii. Kondisi Ekonomi

Latar belakang ekonomi peserta sebagai peserta program dirasa perlu untuk didalami juga dengan maksud untuk mengetahui seberapa mendesak peserta membutuhkan terhadap adanya pemasukan

uang dan hubungannya dalam memanfaatkan insentif dari program Kartu Prakerja. Hasil menunjukkan bahwa peserta masih mampu secara ekonomi. Peserta juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka bukan berasal dari masyarakat prioritas yang membutuhkan bantuan sosial pemerintah pada saat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, peserta menggunakan uang insentif bukan untuk keperluan pokok sehari-hari melainkan untuk ditabung dan untuk jajan. Secara kondisi finansial, peserta program Kartu Prakerja belum tepat sasaran.

Pada aspek pekerjaan, pandemi sangat berdampak pada kondisi pekerjaan peserta. Peserta menjalani sistem *unpaid living*, terkena *lay off* sehingga terpaksa diPHK yang akhirnya kesulitan mencari pekerjaan.

2. Faktor Penghambat

a. Harga Pelatihan Mahal

Diketahui dalam program Kartu Prakerja disediakan saldo pelatihan senilai Rp1.000.000,00 untuk tiap-tiap peserta yang hanya dapat digunakan untuk membeli pelatihan pada program Kartu Prakerja. Menurut data yang didapat, rata-rata harga pelatihan dapat mencapai Rp500 ribu-Rp700 ribu per pelatihan. Jika dibandingkan dengan total saldo pelatihan yang disediakan pada program, tiap-tiap peserta hanya mampu untuk membeli sekitar 1-2 pelatihan saja. Pada akhirnya peserta

program hanya mampu meningkatkan pelatihan sampai batas dasar saja, mengingat harga pelatihan yang menurut para peserta lebih baik digunakan untuk keperluan hidup lainnya.

b. Kualitas Materi Pelatihan

Salah satu penyebab ketidakmaksimalan implemementasi kebijakan program Kartu Prakerja dalam membantu peserta adalah kekurangan pada materi pelatihan itu sendiri. menyatakan bahwa materi pelatihan yang mereka telah ikuti terbilang dasar, *basic*-nya saja, hanya ide-ide dan teori, secara materi tidak dijelaskan secara mendetail dan tidak mengaitkan dengan kondisi *real* di lapangan atau di dunia kerja serta *insight* yang mendalam.

c. Kebutuhan Internet

Jenis pelatihan pada program Kartu Prakerja yang sepenuhnya diselenggarakan secara daring. sistem pelatihan yang diselenggarakan melalui *online* bertujuan untuk optimalisasi teknologi agar pelayanan menjadi efektif dan efisien, menghilangkan batasan ruang dan waktu, serta menyamakan akses dan kualitas pelatihan dengan biaya yang lebih rendah. Namun, dengan online artinya membutuhkan internet untuk mengakses pelatihan. Hasil penelitian

menemukan bahwa kuota internet ini cukup menyulitkan peserta ketika ingin mengakses pelatihan pada program Kartu Prakerja karena pelatihan memuat video-video yang jika dijumlahkan bisa sampai belasan dan puluhan video serta peserta wajib mengikuti webinar *live* yang saat ini menjadi syarat kelulusan dari proses pelatihan. Dari peserta mengatakan bahwa kebutuhan kuota internet jika dinominalkan cukup terasa menguras kantong.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur maka dapat diketahui bahwa:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Program

Secara standar, program Kartu Prakerja telah sesuai dan didasari oleh payung hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga membuat program ini seharusnya dapat memberi hasil yang baik untuk sasaran program. Namun, melihat standar dan tujuan program Kartu Prakerja belum mencapai apa yang diharapkan. Tujuan program adalah untuk meningkatkan pelatihan

kompetensi kerja namun sayangnya, peningkatan yang diupayakan adalah memberi pelatihan secara *online* saja di mana menurut pengalaman peserta belum berjalan dengan baik. Secara sasaran sudah baik

Sasaran Kebijakan/Program

A. Alasan peserta mengikuti program

Sehubungan dengan hasil data penelitian yang telah dianalisis, kelima peserta program di Kota Jakarta Timur, dinilai sudah tepat sasaran ditinjau dari alasan mereka mengikuti program. Tujuan 5 orang peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur mengikuti program ialah untuk meningkatkan kompetensi mereka terhadap suatu materi dan membutuhkan bantuan sosial di mana kedua tujuan ini sejalan dengan kepentingan program Kartu Prakerja.

B. Motif pemilihan pelatihan dan Korelasinya dengan Pekerjaan Peserta

Kelima peserta penelitian ini, yakni 5 orang peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur memilih materi pelatihan pada program Kartu Prakerja berdasarkan pada kebutuhan jenjang karir dan sesuai minat peserta. Pelatihan yang sudah mereka pilih tersebut juga memiliki korelasi dengan pekerjaan peserta sebelum dan pekerjaan yang ingin didapatkan setelah mengikuti program Kartu Prakerja.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa peserta memperhatikan kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan dan mencoba memanfaatkan program sebaik mungkin untuk kebutuhan mereka saat itu. Sayangnya, peserta dikecewakan oleh isi materi pelatihan menurut mereka yang belum bisa meningkatkan kompetensi mereka sehingga berujung pada tidak adanya pengaruh yang signifikan dari pelatihan program Kartu Prakerja untuk kebutuhan peserta saat itu.

C. Penggunaan Insentif

Hasil penelitian ini dari 5 orang peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur, hanya satu peserta saja yang menggunakan keseluruhan insentif untuk meringankan biaya hidup pokok. Empat lainnya menggunakan insentif untuk kepentingan lain seperti menabung, jajan, nongkrong, dan sebagainya. Keempat peserta ini juga mengakui bahwa mereka tidak termasuk kelompok masyarakat yang berasal dari kalangan prioritas yang membutuhkan bantuan biaya dari pemerintah saat pandemi Covid-19.

D. Sikap dan Perilaku

Setelah diteliti lebih dalam, ditemukan ada cacat proses dalam pemanfaatan program oleh Peserta dilihat dari sikap dan perilaku peserta ketika menjalani program. Sikap dan perilaku

tersebut antara lain: tertidur saat pelatihan berlangsung, malas, acuh pada proses pembelajaran pelatihan, dan hanya ingin segera menyelesaikan pelatihan. Padahal, kelima peserta dari Kota Jakarta Timur ini menyikapi pelatihan dengan cukup serius pada awalnya. Namun, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan dalam program Kartu Prakerja sendiri. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut peserta terdiri dari materi yang terlalu umum, *error systems* pada soal tes kompetensi pelatihan, dan sertifikat pelatihan yang belum mampu mengantarkan peserta untuk setidaknya mendapatkan panggilan *interview* kerja.

2. Sumberdaya Program

Program Kartu Prakerja telah berjalan dari awal tahun 2020 dan hingga saat ini telah menghabiskan banyak dana negara. Secara perhitungan kumulatif, total anggaran untuk implementasi program Kartu Prakerja mencapai Rp53 triliun per tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa secara anggaran implementasi program Kartu Prakerja tidak ada masalah kekurangan dana atau anggaran sehingga seharusnya implementasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan program besar kemungkinan dapat tercapai. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa adanya indikasi pemborosan anggaran negara. Sekitar 33% atau sekitar Rp17 triliun

anggaran program diperuntukkan kerjasama dengan pihak swasta, yakni lembaga penyedia pelatihan dan platform digital. Angka ini adalah angka yang sangat besar juga mengingat bahwa program dilaksanakan ketika pandemi. Menurut hasil data yang didapatkan juga bahwa produk dari pelatihan program Kartu Prakerja belum membantu peserta secara signifikan sehingga bisa dikatakan bahwa program belum berhasil mencapai tujuannya.

3. Faktor Latar Belakang Kondisi Sosial dan Ekonomi

1) Karakteristik Kelompok Sasaran

A. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Hasil dari data yang telah diolah, kelima peserta sudah termasuk dalam penduduk usia kerja/produktif Indonesia yang artinya para peserta sudah sesuai dengan sasaran dari program Kartu Prakerja. Urgensi lainnya, yaitu untuk mengetahui apakah peserta *capable* untuk beradaptasi belajar melalui media-media teknologi informasi saat ini seperti pada pelatihan program Kartu Prakerja yang sistemnya dilaksanakan secara *online*. 5 orang peserta program kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang ini.

Pengalaman kelima peserta ketika mengikuti pelatihan program Kartu

Prakerja, mereka merasa bahwa pelatihan tersebut tidak mampu memberi dampak yang signifikan bagi peningkatan kompetensi peserta, artinya program Kartu Prakerja tidak efektif dalam membantu peserta. Total 5 peserta menyatakan bahwa mereka tidak merasakan manfaat dari hasil pelatihan karena isi materi pelatihan yang sudah umum, materi yang dasar, materi terdiri hanya teori-teori saja bukan *insight* yang mendalam, dandan sudah tersedia banyak di internet. Kendati begitu, para peserta mengatakan bahwa pelatihan pada program Kartu Prakerja ini cukup untuk *me-refresh* dan menambah pengetahuan walaupun hanya dalam skala kecil. Begitu juga pada sertifikat hasil pelatihan yang berdasarkan pengalaman mereka, tidak mampu memberi pengaruh dalam meningkatkan probabilitas jenjang karir mereka kearah lebih baik maupun peningkatan rasa percaya diri peserta terhadap *skills* yang dimiliki. Dari pengalaman peserta, ditemukan terdapat berbagai pengaruh dari oknum-oknum yang bisa menghambat tercapainya tujuan program seperti promosi pelatihan yang diiming-imingi hadiah oleh salah satu lembaga penyedia pelatihan dan adanya fenomena Joki Prakerja.

Dampak pandemi menunjukkan bahwa sektor ekonomi dan sosial peserta adalah sektor yang paling terdampak.

Kelima peserta menyampaikan beberapa permasalahan yang mereka alami, antara lain: pengurangan jam kerja yang berujung pada berkurangnya gaji; harus diberhentikan sepihak; dan di rumahkan; sampai pada sulitnya mencari pekerjaan.

Dianalisis dari aspek kehidupan sosial peserta, tidak ada satupun peserta yang mengalami tekanan atau dorongan dari lingkungan keluarga maupun kerabat yang dapat mempengaruhi tujuan dalam mengikuti program Kartu Prakerja. Hasilnya, keinginan untuk mengikuti program berasal dari inisiatif 5 orang peserta program kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur sendiri sehingga semua alasan peserta dalam mengikuti program dan pemanfaatan program berdasarkan keinginan dan kebutuhan pribadi serta bukan paksaan dari pihak manapun.

B. Kondisi Ekonomi Peserta Program

Total kelima peserta setelah dikaji lebih dalam, masih dalam kondisi finansial yang cukup dan tidak membutuhkan dana bantuan sosial pandemi dari pemerintah. Keempat peserta tersebut masih tetap bekerja dan tetap mendapatkan gaji, mendapatkan pesangon dari perusahaan tempat kerja sebelumnya, masih tinggal bersama orang tua mereka sehingga menggunakan uang insentif bukan untuk keperluan pokok sehari-hari melainkan untuk ditabung dan untuk jajan. Keempat

peserta juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka bukan berasal dari masyarakat prioritas yang membutuhkan bantuan sosial pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Pada aspek pekerjaan, kelima orang peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur ini termasuk dalam pekerja terdampak gelombang PHK *mass lay off* sehingga terpaksa diPHK sepihak, bekerja dengan sistem *unpaid living*, sampai pada kesulitan mencari pekerjaan.

Faktor Penghambat Kinerja Implementasi Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur

A. Harga Pelatihan Mahal

Dengan saldo pelatihan yang terbatas, namun rata-rata harga pelatihan yang ditawarkan berkisar Rp500 ribu-Rp700ribu per pelatihan asumsi yang akan terjadi adalah peserta hanya bisa mengikuti maksimal 2 pelatihan sehingga peserta tidak mampu mencapai peningkatan kompetensi pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, hanya sebatas standar saja. Jika ingin mengikuti pelatihan lainnya meski saldo pelatihan sudah habis, peserta dapat membeli menggunakan uang pribadi peserta sendiri atau dengan menggunakan uang insentif dari program Kartu Prakerja. Namun, mengingat saat kondisi pandemi ekonomi terasa sangat dibutuhkan dan

kondisi harga pelatihan pada program Kartu Prakerja yang dihitung cukup mahal apabila menggunakan uang pribadi maka yang terjadi adalah peserta tidak mau menukarkan uangnya untuk membeli pelatihan. Selain karena mahal, alasan materi yang dasar juga mempengaruhi keputusan tersebut sehingga tingkat efektivitas program Kartu Prakerja dalam upayanya meningkatkan kompetensi kerja peserta masih sangat lemah.

B. Kualitas Materi Pelatihan

Peserta menggambarkan kualitas materi pelatihan yang mereka ikuti seperti materi terlalu umum, *basic*, standar, hanya dasar-dasarnya saja, materi pelatihan lebih berfokus pada teori semata, ide-ide, dan penjelasan yang terkadang berulang. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa materi pelatihan yang ditawarkan pada program Kartu Prakerja karena terlalu umumnya, materi dapat dengan mudah ditemukan di platform dan *search engine* lainnya seperti contoh Google dan Youtube. Materi yang terlalu umum dan terlalu dasar ini tidak mampu membawa peningkatan kompetensi yang diinginkan oleh peserta, selaku peserta program. Peserta mengklaim bahwa kualitas materi pelatihan juga tidak dapat banyak membantu peserta memahami lebih jauh dan lebih dalam terkait materi pelatihan tersebut sehingga efek pelatihan kompetensi tidak terasa bermanfaat sebagaimana seharusnya pelatihan

kompetensi memberi kebermanfaat dan dampak bagi peserta pelatihan.

C. Kuota Internet

Mengikuti sistem pelatihan pada program Kartu Prakerja yang secara *online* membuat peserta harus mempersiapkan kuota internet untuk dapat mengakses pelatihan-pelatihan maupun dalam mengikuti keseluruhan proses dalam program. Pelatihan yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja diimplementasikan dalam bentuk video-video dengan durasi yang beragam dan webinar yang sifatnya terjadwal dan *on live*. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa peserta merasa kesulitan ketika ingin mengakses pelatihan terutama saat harus mengikuti webinar *live* pada program Kartu Prakerja. Hal ini dikeluhkan oleh peserta karena kuota internet yang dibutuhkan untuk mengikuti webinar *live* mengkonsumsi kuota internet dalam jumlah yang besar.

Dalam program Kartu Prakerja memang diberikan uang insentif untuk peserta yang bisa digunakan untuk mengganti penggunaan kuota internet ini. Namun, dari peserta serasa enggan untuk menggunakan uang insentifnya untuk membeli kuota internet agar dapat mengikuti pelatihan pada program Kartu Prakerja. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rasa enggan ini juga disebabkan karena materi pelatihan yang tidak sesuai ekspektasi dan keinginan

peserta sehingga mereka juga enggan menghabiskan sejumlah uangnya untuk membeli kuota internet. Adanya keterbatasan dengan kuota internet yang dibebankan ke masing-masing peserta ini juga menyebabkan peserta mencoba mempercepat durasi pembelajaran dengan dalih untuk menghemat kuota dan karena kebutuhan kuota internet untuk mengakses tiap pelatihan mempengaruhi peserta mengurungkan niat untuk mengikuti pelatihan lainnya.

C. Saran

Saran atau rekomendasi yang diberikan terkait hasil dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan ketepatan sasaran pada program, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, dan mengenai kelanjutan penelitian ini yang perlu diperhatikan. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan *stakeholder* yang berhubungan dengan program Kartu Prakerja.

1. Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang mengenai tujuan dari program Kartu Prakerja yang mengemban peran ganda antara peningkatan kompetensi dan bantuan sosial saat pandemi sehingga sasaran

pada program Kartu Prakerja bisa lebih terspesifikasi dan diperjelas agar menghilangkan kesan tumpang tindih sasaran yang pada akhirnya tujuan dapat tercapai dan berdampak secara maksimal. Selain itu, untuk tujuan bantuan sosial alangkah baiknya disalurkan melalui program sosial tersendiri dengan data masyarakat yang akurat dan sesuai survei lapangan yang sebenarnya sehingga mampu meminimalisir penyalahgunaan bantuan dari program, yang pada akhirnya program benar-benar tepat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, pemerintah diharapkan segera menerapkan kebijakan implementasi program dengan sistem *offline* bagi materi-materi pelatihan tertentu yang memang membutuhkan pelatihan langsung secara tatap muka dalam pembelajarannya sehingga hasil pelatihan dapat efektif membantu peserta dalam meningkatkan kompetensi pada materi tersebut serta kepercayaan diri peserta. Sertifikat hasil pelatihan *offline* dianggap lebih serius karena pelaksanannya lebih diawasi sehingga berpengaruh pada kualitas sertifikat pelatihan di mata *recruiter*. Kemudian, alangkah lebih baik pemerintah juga mengupayakan perluasan kesempatan kerja bagi peserta program Kartu Prakerja melalui

kerjasama antar perusahaan maupun wirausahawan di Kota Jakarta Timur maupun disekitar Kota DKI Jakarta.

- b. Perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Timur dan Badan Latihan Kerja (BLK) di Kota Jakarta Timur serta Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) Kota Jakarta terkait pelaksanaan pelatihan kompetensi kerja mengingat kedua lembaga resmi pemerintah tersebut sudah lebih dahulu menyelenggarakan upaya-upaya agar tercapainya kualitas SDM pekerja Indonesia yang mumpuni melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi kerja.
- c. Bagi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) selaku organisasi yang berfungsi memantau dan mengevaluasi program Kartu Prakerja, perlu dilakukan pemantauan terkait kemitraan antara lembaga penyedia pelatihan. Selain itu, sebagai wadah yang menaungi para lembaga-lembaga penyedia pelatihan diharapkan PMO program Kartu Prakerja melakukan peninjauan mendalam terkait kualitas materi pada pelatihan dengan membandingkan materi pelatihan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh siapapun di luar program Kartu Prakerja

karena jika materi-materi pelatihan dapat dengan mudah ditemukan melalui *search engine* seperti Google, maka adanya program Kartu Prakerja dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

2. Faktor Penghambat Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur

- a. Lembaga penyedia pelatihan program Kartu Prakerja agar menyesuaikan harga pelatihan dengan kualitas materi pelatihan yang ditawarkan sehingga peserta dapat merasakan manfaat yang signifikan dan semaksimal mungkin.
- b. Bagi lembaga penyedia pelatihan diharapkan segala bentuk promosi pelatihan seharusnya mengedepankan kualitas materi pelatihan dan mengutamakan tujuan program, yakni untuk peningkatan kompetensi bukan hanya ingin menjual produk pelatihan dari lembaga penyedia pelatihan masing-masing sehingga orientasi peserta dapat lebih terarah dan sejalan dengan tujuan dari program Kartu Prakerja. Kualitas materi perlu dibuat lebih menarik, *relatable* dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, dan mendetail serta dilengkapi dengan tiap tingkatan-tingkatan kesulitan yang bervariasi sehingga peserta program

- Kartu Prakerja semakin mempunyai banyak pilihan dan betul-betul dapat mengandalkan pelatihan pada program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensinya terhadap materi tertentu sampai pada level yang diinginkan.
- c. Pemerintah dan Manajemen Pelaksana agar mengkaji ulang sistem pelatihan *online* berupaya meminimalkan beban dari peserta terhadap tanggungan biaya internet yang diperlukan untuk mengakses serangkaian pelatihan pada program.
 - d. Lembaga Penyedia Pelatihan untuk menetapkan harga pelatihan yang lebih terjangkau oleh peserta mengingat harga pelatihan yang cenderung mahal agar peserta dapat meningkatkan kompetensinya mengikuti pelatihan yang lebih beragam tanpa terkendala biaya. Selain itu, program Kartu Prakerja dapat menjadi program pelatihan yang diandalkan oleh peserta maupun masyarakat pekerja.

Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan peserta atau sampel yang lebih besar berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh agar hasil temuan dapat digeneralisir secara umum, mengingat penelitian ini hanya berdasarkan studi kasus pada 5 peserta program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2004). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. 140–144.
- Kemenko Perekonomian. (2020). Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020. 1–39. <https://static-asset-cdn.prakerja.go.id/www/ebook-reporting/Buku-Prakerja-Fix.pdf>
- Kemenperin. (2021). *Efektivitas Diklat Daring di Masa Pandemi*. <https://kemenperin.go.id/artikel/22242/Efektivitas-Diklat-Daring-di-Masa-Pandemi>
- Kumparan.com. (2021). *Penerima Kartu Prakerja di Jakarta Capai 285 Ribu Orang, Jakarta Timur Terbanyak*.
- Kurniawansyah, H., Amrullah, M., & Salahuddin, N. (2020). KONSEP KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM MENANGANI EKSTERNALITAS EKONOMI DARI COVID-19 PADA MASYARAKAT RENTAN DI INDONESIA. In *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 1, Issue 2). <https://finance.detik.com/berita->
- Novira, M. (2020, March 24). *Pengaruh Pengangguran Terhadap Perekonomian dan Lingkungan Sosial*.
- Rahmadani, I., Simin, S., & Indiahono, D. (2020). Implementasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(01), 47–61. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.31>

Rizal, J. G. (2020). *Kebijakan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Terasa Diberikan Bantuan Langsung*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/17/213716365/kebijakan-kartu-prakerja-dinilai-tak-efektif-ekonom-lebih-terasa-diberikan?page=all>

Sellang, K. (2019). ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya. Akmen, February, 1–229.

Subarsono. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (X).

Tim JDIH Badan Pemeriksan Keuangan. (2020). *TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KARTU PRAKERJA*.